# Badan Standardisasi Nasional

## LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016

Gedung I BPPT Lantai 9-14
Jl. M.H Thamrin No.8, Jakarta 10340
Telp: 021 392 7422
Fax : 021 392 7527

# KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 14 Tahun 2015 tentang APBN tahun 2016 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Standardisasi Nasional adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional Audited Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Standardisasi Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 25 April 2017
Badan Standardisasi Nasional,
Kepala,

Prof. DR. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc
NIP. 19600323 198412 1 001

# DAFTAR ISI


| | Hal |
|---|---|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Ringkasan | 1 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 3 |
| II. Neraca | 4 |
| III. Laporan Operasional | 5 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 6 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| A. Penjelasan Umum | 7 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 20 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 27 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 37 |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 42 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 44 |
| VI. Lampiran dan Daftar | 55 |
| A. Hasil E-Rekon | |
| B. Hasil SAIBA | |
| C. Nota Kesepakatan Asersi Angka Final dan BAR | |
| D. Pendapatan Diterima Dimuka dan Hutang | |
| E. Catatan Ringkas Barang Milik Negara | |

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**LAPORAN KEUANGAN BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional Audited untuk tahun anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 25 April 2017

Plt. Inspektur,

Ir. Nasrudin Irawan,M.Env.Stud
NIP. 19620509 199001 1 001

# BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527
Situs http://www.bsn.go.id email : bsn@bsn.go.id


## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 April 2017
Badan Standardisasi Nasional
Kepala,

Prof. DR. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc
NIP. 19600323 198412 1 001

# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional Audited Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp19.022.268.750 atau mencapai 134,77 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp14.115.807.650.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp119.816.128.032 atau mencapai 94,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp126.178.139.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.663.728.463 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.167.194.582; Aset Tetap (neto) sebesar Rp23.703.621.601; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp1.268.438.437; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.524.473.843.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp950.331.129 dan Rp28.713.397.334.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp18.453.002.862, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp119.239.166.096 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(100.786.163.234). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(119.435.238) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(100.905.598.472).

## 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp30.604.833.532, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(100.905.598.472) kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp(1.405.697.008), transaksi antar entitas senilai Rp100.419.859.282 serta penurunan entitas senilai Rp(1.891.436.198) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp28.713.397.334.

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## BADAN STANDARDISASI NASIONAL
## LAPORAN REALISASI ANGGARAN
## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2016 | | % thd Angg | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| **PENDAPATAN** | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 14.115.807.650 | 19.022.268.750 | 134,77 | 18.299.821.817 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **14.115.807.650** | **19.022.268.750** | **134,77** | **18.299.821.817** |
| **BELANJA** | B.2 | | | | |
| **Belanja Operasi** | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 44.403.218.000 | 43.143.343.439 | 97,16 | 35.240.803.005 |
| Belanja Barang | B.4 | 72.889.280.000 | 68.176.490.368 | 93,53 | 99.442.245.841 |
| **Jumlah Belanja Operasi** | | 117.292.498.000 | 111.319.833.807 | 94,91 | 134.683.048.846 |
| **Belanja Modal** | B.5 | | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | B.5.1 | 4.955.641.000 | 4.922.060.200 | 99,32 | 9.794.240.221 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | B.5.2 | 3.740.000.000 | 3.435.294.025 | 91,85 | 5.255.329.008 |
| Belanja Modal Lainnya | B.5.3 | 190.000.000 | 138.940.000 | 73,13 | 7.718.090.770 |
| **Jumlah Belanja Modal** | | 8.885.641.000 | 8.496.294.225 | 95,62 | 22.767.659.999 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **126.178.139.000** | **119.816.128.032** | **94,96** | **157.450.708.845** |

# BADAN STANDARDISASI NASIONAL
## NERACA
## PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| **ASET LANCAR** | | | |
| Piutang Bukan Pajak | C.1 | 7.500.000 | 84.286.808 |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C.2 | (37.500) | (310.000) |
| *Piutang Bukan Pajak (Netto)* | | *7.462.500* | *83.976.808* |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi | C.3 | 1.045.273.444 | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi | C.4 | (5.226.367) | - |
| *Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (Netto)* | | 1.040.047.077 | - |
| Persediaan | C.5 | 119.685.005 | 117.137.000 |
| Jumlah Aset Lancar | | 1.167.194.582 | 201.113.808 |
| **ASET TETAP** | | | |
| Peralatan dan Mesin | C.6 | 35.587.899.485 | 34.560.818.826 |
| Aset Tetap Lainnya | C.7 | 6.774.028.436 | 4.694.331.111 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.8 | 3.837.380.508 | 3.837.380.508 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.9 | (22.495.686.828) | (21.814.880.767) |
| Jumlah Aset Tetap | | 23.703.621.601 | 21.277.649.678 |
| **PIUTANG JANGKA PANJANG** | | | |
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi | C.10 | 1.274.812.500 | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi | C.11 | (6.374.063) | - |
| *Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto)* | | 1.268.438.437 | |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | 1.268.438.437 | - |
| **ASET LAINNYA** | | | |
| Aset Tidak Berwujud | C.12 | 7.851.599.520 | 9.788.472.020 |
| Aset Lain-Lain | C.13 | 1.868.786.007 | 337.502.399 |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.14 | (6.195.911.684) | (273.583.399) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 3.524.473.843 | 9.852.391.020 |
| **JUMLAH ASET** | | **29.663.728.463** | **31.331.154.506** |
| **KEWAJIBAN** | | | - |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.15 | 240.281.129 | 120.895.974 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C.16 | 710.050.000 | 605.425.000 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | | 950.331.129 | 726.320.974 |
| **EKUITAS** | | | |
| Ekuitas | C.17 | 28.713.397.334 | 30.604.833.532 |
| **JUMLAH EKUITAS** | | 28.713.397.334 | 30.604.833.532 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | | **29.663.728.463** | **31.331.154.506** |

# BADAN STANDARDISASI NASIONAL
## LAPORAN OPERASIONAL
## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | |
| **PENDAPATAN** | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | 18.453.002.862 | 16.988.487.190 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **18.453.002.862** | **16.988.487.190** |
| | | | |
| **BEBAN** | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 43.159.146.309 | 35.232.089.889 |
| Beban Persediaan | D.3 | 1.765.044.910 | 1.818.018.940 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 46.273.656.935 | 79.627.495.522 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 3.774.809.979 | 3.115.144.434 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 17.817.533.972 | 13.528.476.327 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7 | 6.437.646.061 | 3.576.948.078 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.8 | 11.327.930 | (55.000) |
| Beban Lain-lain | | - | - |
| **JUMLAH BEBAN** | | **119.239.166.096** | **136.898.118.190** |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (100.786.163.234) | (119.909.631.000) |
| | | | |
| **KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | D.9 | (268.322.766) | 821.538.000 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.10 | 148.887.528 | 31.234.272 |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | (119.435.238) | 852.772.272 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (100.905.598.472) | (119.056.858.728) |
| | | | |
| **SURPLUS/DEFISIT LO** | | **(100.905.598.472)** | **(119.056.858.728)** |

## BADAN STANDARDISASI NASIONAL
## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 30.604.833.532 | 14.597.833.031 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (100.905.598.472) | (119.056.858.728) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | E.3 | - | |
| KOREKSI YANG MENAMBAH ATAU MENGURANGI EKUITAS *) | E.4 | (1.405.697.008) | (1.206.017.799) |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.4.1 | | 6.050.701 |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.4.2 | | |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | E.4.3 | | |
| KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI | E.4.4 | (1.405.697.008) | (1.212.068.500) |
| KOREKSI LAIN-LAIN | E.4.5 | | |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.5 | 100.419.859.282 | 136.269.877.028 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | | (1.891.436.197) | 16.007.000.501 |
| **EKUITAS AKHIR** | E.6 | **28.713.397.335** | **30.604.833.532** |

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis*

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian disempurnakan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia, dan yang terakhir diubah lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan, BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Tujuan kegiatan standardisasi di Indonesia adalah terwujudnya jaminan mutu produk dan jasa, dengan memperhatikan segi-segi kemanan, keselamatan, kesehatan dan fungsi lingkungan hidup dalam memenuhi kelancaran masuknya produk dan jasa Indonesia dalam pasar bebas serta melindungi konsumen. Penerapan standar mencakup dorongan dan fasilitasi untuk meningkatkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh para pemangku kepentingan. Pada dasarnya penerapan SNI yang ditetapkan oleh BSN bersifat sukarela (*voluntary*). Dengan demikian, fungsi penerapan SNI lebih merupakan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan melakukan transaksi pasar. Namun untuk kepentingan melindungi kepentingan umum atau untuk memacu perkembangan dunia usaha, maka pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan meregulasi kegiatan produksi dan pasar, dapat memberlakukan SNI sebagai regulasi teknis. Dengan demikian SNI menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku pasar.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kepala Badan Standardisasi Nasional berkomitmen dengan menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Visi BSN

Menyelaraskan antara visi pembangunan nasional untuk 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III tahun 2015-2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yaitu ”Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK”, serta memperhatikan dukungan nyata Iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa melalui pengembangan infrastruktur mutu nasional dan tantangan yang dihadapi standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi, maka BSN menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu: Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan memberikan kemampuan untuk melindungi pasar dalam negeri dan kemampuan untuk melakukan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mewujudkan Visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Pemangku Kepentingan.

3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa

Tujuan BSN

Melalui pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi 2015 – 2019, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, tujuan yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode 2015–2019 adalah:

1. Mewujudkan sistem pengembangan SNI yang efektif dan efisien mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
2. Mewujudkan sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan ketelusuran pengukuran yang efektif dan efisien mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
3. Mewujudkan peningkatan budaya mutu, kompetensi, dan efektifitas sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran Strategis BSN

Dengan memperhatikan 3 (tiga) Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diamanahkan oleh UU No. 20 Tahun 2014, serta Sasaran Pembangunan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 “Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi” dari agenda prioritas 6 “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional” pada Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) dalam RPJMN 2015–2019 untuk “meningkatkan dukungan IPTEK bagi daya saing sektor produksi”, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode 2015–2019 adalah:

1. Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik.
3. Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global.
4. Terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI.
6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran.
7. Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yag profesional di BSN.

BSN terdiri dari satu sekretariat utama dan tiga kedeputian yaitu :

a. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BSN.
b. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
c. Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi mempunyai tugas melaksan akan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan kerja sama standardisasi.
d. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pemasyarakatan standardisasi.

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

### A.3. Basis Akuntansi

Badan Standardisasi Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Standardisasi Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

## A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
    - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

#### Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
    - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
    - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

#### Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

### Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

### Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

### (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|---|---|---|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

*Penyusutan Aset Tetap*

### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|---|---|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali*

### (10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi Pendapatan Rp19.022.268.750*

### B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Badan Standardisasi Nasional pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19.022.268.750 atau mencapai 134,77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.115.807.650. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

| Uraian | 2016 | | |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN | - | Rp 6.900.000 | 100,00 |
| Pendapatan Jasa | Rp 14.115.807.650 | Rp 18.593.127.862 | 131,72 |
| Pendapatan Lain-lain | - | Rp 422.240.888 | 100,00 |
| **Jumlah** | **Rp 14.115.807.650** | **Rp 19.022.268.750** | **134,77** |

Realisasi Pendapatan periode 31 Desember 2016 dibandingkan dengan estimasi pendapatan periode 31 Desember 2016 sebesar Rp14.115.807.650 adalah 134,77%. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015 terdapat kenaikan sebesar 3,95 persen. Dari nilai Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 422.240.888 terdapat kesalahan input kode akun oleh pihak ketiga pada saat melakukan pembayaran melalui Aplikasi SIMPONI senilai Rp. 19.000.000 yang seharusnya merupakan Pendapatan Jasa namun menjadi Pendapatan Lain-lain.

*Rincian Pendapatan Lain-Lain*

| Uraian | Realisasi |
|---|---|
| Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara (PT. Taspen) | Rp 22.124.400 |
| Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (PT. DCP) | Rp 30.000.000 |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL | Rp 111.401.108 |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL | Rp 17.437.572 |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL | Rp 222.277.808 |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain | Rp 19.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp 422.240.888** |

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 2016 dan 2015*

| URAIAN | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pengelolaan BMN | 6.900.000 | 821.538.000 | (99,16) |
| Pendapatan Jasa | 18.593.127.862 | 17.443.549.515 | 6,59 |
| Pendapatan Lain-lain | 422.240.888 | 34.734.302 | 1115,63 |
| **Jumlah** | **19.022.268.750** | **18.299.821.817** | **3,95** |

*Realisasi Belanja Rp119.816.128.032*

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja Badan Standardisasi Nasional pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp119.816.128.032 atau 94,96% dari anggaran belanja sebesar Rp126.178.139.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2016 tersaji sebagai berikut:

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

| PROGRAM | 2016 | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANGGARAN | | REALISASI | | |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp | 76,481,183,000 | Rp | 74,128,495,875 | 96.92 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN | Rp | 4,405,196,000 | Rp | 4,390,804,600 | 99.67 |
| Program Pengembangan Standardisasi Nasional | Rp | 45,291,760,000 | Rp | 41,296,827,557 | 91.18 |
| **Total Belanja** | **Rp** | **126,178,139,000** | **Rp** | **119,816,128,032** | **94.96** |

*Perbandingan Realisasi Belanja 2016 dan 2015*

| URAIAN | REALISASI 2016 | | REALISASI 2015 | | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | Rp | 22.446.540.367 | Rp | 20.742.054.153 | 8,22 |
| Belanja Lembur | Rp | - | Rp | - | - |
| Belanja Tunj. Khusus | Rp | 21.836.579.550 | Rp | 15.136.911.249 | 44,26 |
| **Jumlah Belanja Kotor** | **Rp** | **44.283.119.917** | **Rp** | **35.878.965.402** | **23,42** |
| Pengembalian Belanja Pegawai | Rp | (1.139.776.478) | Rp | (638.162.397) | 78,60 |
| **Jumlah Belanja** | **Rp** | **43.143.343.439** | **Rp** | **35.240.803.005** | **22,42** |

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 23,90 persen dibandingkan dengan belanja sampai dengan 31 Desember 2015.

*Belanja Pegawai Rp43.143.343.439*

## B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp43.143.343.439 dan Rp35.240.803.005 atau terjadi kenaikan sebesar 22,42%. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan belanja pegawai baru dan kenaikan tunjangan kinerja serta pembayaran gaji ke-13 dan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

| URAIAN | REALISASI 2016 | | REALISASI 2015 | | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | Rp | 22.446.540.367 | Rp | 20.742.054.153 | 8,22 |
| Belanja Lembur | Rp | - | Rp | - | - |
| Belanja Tunj. Khusus | Rp | 21.836.579.550 | Rp | 15.136.911.249 | 44,26 |
| **Jumlah Belanja Kotor** | **Rp** | **44.283.119.917** | **Rp** | **35.878.965.402** | **23,42** |
| Pengembalian Belanja Pegawai | Rp | (1.139.776.478) | Rp | (638.162.397) | 78,60 |
| **Jumlah Belanja** | **Rp** | **43.143.343.439** | **Rp** | **35.240.803.005** | **22,42** |

Pengembalian belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.139.776.478 disebabkan karena pengembalian pembayaran tunjangan kinerja setiap bulan.

*Belanja Barang*
*Rp68.176.490.368*

## B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp68.176.490.368 dan Rp99.442.245.841. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016 mengalami penurunan 31,44 persen dari Realisasi Belanja Barang 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah.

| URAIAN | REALISASI 2016 | | REALISASI 2015 | | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Barang Operasional | Rp | 3,303,614,495 | Rp | 3,130,341,093 | 5.54 |
| Belanja Barang Non Operasional | Rp | 11,473,332,024 | Rp | 31,107,729,806 | (63.12) |
| Belanja Barang Persediaan | Rp | 1,769,668,467 | Rp | 1,705,929,599 | 3.74 |
| Belanja Jasa | Rp | 31,410,708,131 | Rp | 45,387,286,582 | (30.79) |
| Belanja Pemeliharaan | Rp | 2,419,213,279 | Rp | 4,598,204,034 | (47.39) |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | Rp | 14,617,620,831 | Rp | 9,891,316,569 | 47.78 |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri | Rp | 3,411,044,490 | Rp | 3,708,152,462 | (8.01) |
| **Jumlah Belanja Kotor** | **Rp** | **68,405,201,717** | **Rp** | **99,528,960,145** | **(31.27)** |
| Pengembalian Belanja Barang | Rp | (228,711,349) | Rp | (86,714,304) | 163.75 |
| **Jumlah Belanja** | **Rp** | **68,176,490,368** | **Rp** | **99,442,245,841** | **(31.44)** |

Pengembalian belanja barang sebesar Rp228.711.349 sebagian besar merupakan belanja perjalanan dinas.

*Belanja Modal*
*Rp8.496.294.225*

## B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.496.294.225 dan Rp22.767.659.999. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 62,68 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah.

| URAIAN | REALISASI 2016 | | REALISASI 2015 | | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Peralatan dan Mesin | Rp | 4,922,060,200 | Rp | 9,794,240,221 | (49.75) |
| Belanja Gedung Bangunan | Rp | 3,435,294,025 | Rp | 5,255,329,008 | (34.63) |
| Belanja Modal Lainnya | Rp | 138,940,000 | Rp | 7,718,090,770 | (98.20) |
| **Jumlah Belanja** | **Rp** | **8,496,294,225** | **Rp** | **22,767,659,999** | **(62.68)** |

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4.922.060.200*

### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.922.060.200 dan Rp9.794.240.221. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 49,75 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2016 dan 2015*

| URAIAN BELANJA MODAL | REALISASI 2016 | | REALISASI 2015 | | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp | 4,922,060,200 | Rp | 9,788,540,221 | (49.72) |
| Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola | | | Rp | 5,700,000 | 0.00 |
| Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan | | | Rp | - | 0.00 |
| **Jumlah Belanja Kotor** | **Rp** | **4,922,060,200** | **Rp** | **9,794,240,221** | **(49.75)** |
| Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp | - | Rp | - | 0.00 |
| **Jumlah Belanja** | **Rp** | **4,922,060,200** | **Rp** | **9,794,240,221** | **(49.75)** |

Adapun rincian pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sedan | 1 | 643,920,000 |
| 2 | Minibus | 11 | 3,154,100,000 |
| 3 | Lemari Kayu | 5 | 48,895,000 |
| 4 | Rak Kayu | 1 | 1,650,000 |
| 5 | LCD Projector Infocus | 2 | 13,585,000 |
| 6 | Meja Kerja Besi/Metal | 1 | 2,400,000 |
| 7 | Meja Kerja Kayu | 1 | 4,350,000 |
| 8 | Kursi Besi/Metal | 106 | 90,350,000 |
| 9 | Sice | 1 | 5,250,000 |
| 10 | Meja Rapat | 5 | 162,959,500 |
| 11 | AC Sentral | 1 | 33,308,000 |
| 12 | AC Split | 31 | 232,812,500 |
| 13 | Exhaust Fan | 10 | 43,978,000 |
| 14 | Loudspeaker | 2 | 7,700,000 |
| 15 | Audio Amplifier | 1 | 6,600,000 |
| 16 | Mic Wireless | 11 | 56,133,000 |
| 17 | Microphone Connector Box | 1 | 27,467,000 |
| 18 | Power Supply Microphone | 1 | 9,152,000 |
| 19 | Headset | 2 | 1,661,000 |
| 20 | Camera Digital | 2 | 27,123,000 |
| 21 | Handy Talky (HT) | 4 | 4,730,000 |
| 22 | Kursi Dorong | 1 | 2,628,100 |
| 23 | Tripod | 1 | 1,012,000 |
| 24 | P.C Unit | 1 | 13,400,840 |
| 25 | Laptop | 5 | 58,010,760 |
| 26 | Notebook | 1 | 5,445,000 |
| 27 | Storage Modul Disk | 2 | 1,210,000 |
| 28 | Printer | 2 | 10,367,500 |
| 29 | External Harddisk | 5 | 13,606,000 |
| 30 | Router | 3 | 31,790,000 |
| 31 | Hub | 2 | 4,826,000 |
| 32 | Voice Recorder | 1 | 2,640,000 |
| 33 | Software | 1 | 199,000,000 |
| **Total** | | **224** | **4,922,060,200** |

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp3.435.294.025*

### B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.435.294.025 dan Rp5.255.329.008. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 34,63 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2016 dan 2015*

| URAIAN JENIS BELANJA | 2016 | 2015 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 3,223,538,900 | Rp 1,412,148,500 | 128.27 |
| Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan | Rp 211,755,125 | Rp 3,843,180,508 | (94.49) |
| **Jumlah Belanja Kotor** | **Rp 3,435,294,025** | **Rp 5,255,329,008** | **(34.63)** |
| Pengembalian Belanja Modal | Rp - | Rp - | 0.00 |
| **Jumlah Belanja** | **Rp 3,435,294,025** | **Rp 5,255,329,008** | **(34.63)** |

Adapun rincian pembelian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovasi Toilet | 1 | 1,049,317,600 |
| 2 | Perbaikan Ducting | 1 | 1,355,596,700 |
| 3 | Renovasi Ruang Rapat Utama | 1 | 1,030,379,725 |
| **Total** | | **3** | **3,435,294,025** |

*Belanja Modal Lainnya Rp138.940.000*

### B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp138.940.000 dan Rp7.718.090.770. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 98,20 persen dibandingkan realisasi periode sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 2016 dan 2015*

| URAIAN JENIS BELANJA | 2016 | 2015 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Lainnya | Rp 138,940,000 | Rp 7,718,090,770 | (98.20) |
| **Jumlah Belanja Kotor** | **Rp 138,940,000** | **Rp 7,718,090,770** | **(98.20)** |
| Pengembalian Belanja Modal Lainnya | Rp - | Rp - | - |
| **Jumlah Belanja** | **Rp 138,940,000** | **Rp 7,718,090,770** | **(98.20)** |

Adapun rincian pembelian Belanja Modal Lainnya sebagai berikut:

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Dokumentasi dan Informasi | 1 | 44,660,000 |
| 2 | Aplikasi Penelitian (Puslitbang) | 1 | 49,280,000 |
| 3 | Portal Website Badan Standardisasi Nasional | 1 | 45,000,000 |
| **Total** | | **3** | **138,940,000** |

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Piutang Bukan Pajak Rp7.500.000*

### C.1 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp7.500.000 dan Rp84.286.808. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan disajikan sebagai berikut:

| Uraian Piutang | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Piutang PNBP | Rp 7,500,000 | Rp 62,000,000 |
| Piutang Lainnya | - | Rp 22,286,808 |
| **Jumlah** | **7,500,000** | **Rp 84,286,808** |

Piutang PNBP sebesar Rp. 7.500.000 berasal dari Stasiun KIPM dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Baubau.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp(37.500)*

### C.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(37.500) dan Rp(310.000).

Penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|---|---|---|
| **Piutang Bukan Pajak** | | | |
| Lancar | 7.500.000 | 0,50% | 37.500 |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| **Jumlah** | **7.500.000** | | **37.500** |
| **Jumlah** | **7.500.000** | | **37.500** |
| **Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **7.500.000** | | **37.500** |

*Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp1.045.273.444*

### C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.045.273.444 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12

(dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

| Bagian Lancar Tagihan TP/TGR | Nilai TP/TGR |
|---|---|
| PT. DCP | 245,273,444 |
| PT. MCS | 800,000,000 |
| **Jumlah** | **1,045,273,444** |

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp(5.226.367)*

## C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(5.226.367) dan Rp0.

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|---|---|---|
| **Piutang Tidak Tertagih** | | | |
| Lancar | 1.045.273.444 | 0,50% | 5.226.367 |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| **Jumlah** | **1.045.273.444** | | **5.226.367** |
| **Jumlah** | **1.045.273.444** | | **5.226.367** |
| **Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **1.045.273.444** | | **5.226.367** |

*Persediaan Rp119.685.005*

## C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp119.685.005 dan Rp117.137.000. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| Uraian Persediaan | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Barang Konsumsi | Rp 119.685.005 | Rp 117.137.000 |
| Barang untuk Pemeliharaan | | |
| Suku Cadang | | |
| Persediaan Lainnya | | |
| **Jumlah** | **Rp 119.685.005** | **Rp 117.137.000** |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Peralatan dan Mesin Rp35.587.899.485*

## C.6 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp35.587.899.485 dan Rp34.560.818.826. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015** | **Rp** | **34,560,818,826** |
| **Mutasi tambah:** | | |
| Pembelian | Rp | 4,922,060,200 |
| **Mutasi kurang:** | | |
| Pembelian yang dicatat sebagai ATB (reklasifikasi) | Rp | (199,000,000) |
| Penghentian penggunaan Peralatan & Mesin | Rp | (2,073,479,541) |
| Hibah dan Transfer Keluar | Rp | (1,622,500,000) |
| **Saldo per 31 Desember 2016** | **Rp** | **35,587,899,485** |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 | Rp | (22,495,686,828) |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2016** | **Rp** | **13,092,212,657** |

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian dari Belanja Modal Peralatan & Mesin sebesar Rp4.922.060.200 terdiri dari:

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sedan | 1 | 643,920,000 |
| 2 | Minibus | 11 | 3,154,100,000 |
| 3 | Lemari Kayu | 5 | 48,895,000 |
| 4 | Rak Kayu | 1 | 1,650,000 |
| 5 | LCD Projector Infocus | 2 | 13,585,000 |
| 6 | Meja Kerja Besi/Metal | 1 | 2,400,000 |
| 7 | Meja Kerja Kayu | 1 | 4,350,000 |
| 8 | Kursi Besi/Metal | 106 | 90,350,000 |
| 9 | Sice | 1 | 5,250,000 |
| 10 | Meja Rapat | 5 | 162,959,500 |
| 11 | AC Sentral | 1 | 33,308,000 |
| 12 | AC Split | 31 | 232,812,500 |
| 13 | Exhaust Fan | 10 | 43,978,000 |
| 14 | Loudspeaker | 2 | 7,700,000 |
| 15 | Audio Amplifier | 1 | 6,600,000 |
| 16 | Mic Wireless | 11 | 56,133,000 |
| 17 | Microphone Connector Box | 1 | 27,467,000 |
| 18 | Power Supply Microphone | 1 | 9,152,000 |
| 19 | Headset | 2 | 1,661,000 |
| 20 | Camera Digital | 2 | 27,123,000 |
| 21 | Handy Talky (HT) | 4 | 4,730,000 |
| 22 | Kursi Dorong | 1 | 2,628,100 |
| 23 | Tripod | 1 | 1,012,000 |
| 24 | P.C Unit | 1 | 13,400,840 |
| 25 | Laptop | 5 | 58,010,760 |
| 26 | Notebook | 1 | 5,445,000 |
| 27 | Storage Modul Disk | 2 | 1,210,000 |
| 28 | Printer | 2 | 10,367,500 |
| 29 | External Harddisk | 5 | 13,606,000 |
| 30 | Router | 3 | 31,790,000 |
| 31 | Hub | 2 | 4,826,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Voice Recorder | 1 | 2,640,000 |
| 33 | Software | 1 | 199,000,000 |
| **Total** | | **224** | **4,922,060,200** |

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin berasal dari:

a. Pembelian Aset Tak Berwujud yang menggunakan Belanja Modal Peralatan & Mesin sebesar Rp199.000.000;

b. Penghentian penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.073.479.541 sebanyak 282 unit terdiri dari kendaraan jenis Bus, PC Unit, Laptop, dan Notebook berdasarkan Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Milik Negara No. 09A/Biro-PKT/09/2016, No.166C/Biro-PKT/09/2016 dan No. 196A/Biro-PKT/09/2016 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Penghentian Aset Tetap**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus | 1 | Rp. 257,500,000 |
| 2 | Minibus | 6 | Rp. 620,084,000 |
| 3 | Meja Kerja Kayu | 147 | Rp. 97,958,636 |
| 4 | P.C Unit | 101 | Rp. 692,122,744 |
| 5 | Laptop | 16 | Rp. 198,118,161 |
| 6 | Notebook | 11 | Rp. 207,696,000 |
| **Total** | | **282** | **Rp. 2.073.479.541** |

c. Hibah dan Transfer Keluar 3 unit Peralatan dan Mesin berupa alat laboratorium senilai Rp1.622.500.000 kepada Kementerian Perdagangan berdasarkan BAST Nomor 2023/BSN/B0-b1/8/16 dan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan BAST Nomor 2210/BSN/B0-b1/9/16.

**Tabel Hibah dan Transfer Keluar**

| No. | Nama Alat Laboratorium | Merk | Type | Nilai | Instansi Tujuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomic Absortion Spectroscopy (AAS) | Shimadzu | AA 7000 | 687.500.000 | BPMB Jakarta |
| 2 | UV-Vis Spectrophotometer | Agilent | 8453 | 247.500.000 | BPMB Jakarta |
| 3 | Atomic Absortion Spectroscopy (AAS) | Shimadzu | AA 7000 | 687.500.000 | Baristand Medan |
| **Total** | | | | **1.622.500.000** | |

*Aset Tetap Lainnya Rp6.774.028.436*

## C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp6.774.028.436 dan Rp4.694.331.111. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 Desember 2015** | **Rp** | **4.694.331.111** |
| Mutasi tambah: | | |
| Pembelian | Rp | 3.435.294.025 |
| Mutasi kurang: | | |
| Koreksi ke Beban Pemeliharaan | Rp | (1.355.596.700) |
| **Saldo per 31 Desember 2016** | **Rp** | **6.774.028.436** |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 | | - |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2016** | **Rp** | **6.774.028.436** |

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.435.294.025 berasal dari pekerjaan renovasi gedung dan bangunan milik BPPT. Rincian pekerjaan renovasi terdiri dari:

**Tabel – Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovasi Toilet | 1 | 1,049,317,600 |
| 2 | Perbaikan Ducting | 1 | 1,355,596,700 |
| 3 | Renovasi Ruang Rapat Utama | 1 | 1,030,379,725 |
| **Total** | | **3** | **3,435,294,025** |

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(1.355.596.700) berasal dari koreksi perbaikan Ducting yang diakui sebagai Beban Pemeliharaan.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp3.837.380.508*

## C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.837.380.508 dan Rp3.837.380.508. Konstruksi dalam pengerjaan pada 31 Desember 2016 merupakan tahap perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Metrologi Biologi dan Acuan Peralatan Kesehatan BSN yang berlokasi di kawasan Puspitek Serpong Kecamatan Cisauk. Sampai dengan tanggal neraca tahap perencanaan telah selesai dengan persentase 100%.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(22.495.686.828)*

## C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp(22.495.686.828) dan Rp(21.814.880.767). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

***Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap***

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | | Akm. Penyusutan | | Nilai Buku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralatan dan Mesin | Rp | 35,587,899,485 | Rp | 22,495,686,828 | Rp | 13,092,212,657 |
| 2 | Aset Tetap Lainnya | Rp | 8,129,625,136 | Rp | - | Rp | 8,129,625,136 |
| | **Akumulasi Penyusutan** | **Rp** | **43,717,524,621** | **Rp** | **22,495,686,828** | **Rp** | **21,221,837,793** |

Pasal 4 ayat 1 huruf d, PMK Nomor 247/PMK.06/2014 menyatakan Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sehingga pada tahun 2015 terdapat Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi yang berupa Renovasi LiTE Lantai Dasar, Renovasi Ruang Sestama, dan Renovasi Ruang Kepala Badan. Namun pada Lampiran KMK 128/KM.6/2015 menyatakan Aset Tetap Lainnya yang berupa Aset Tetap dalam Renovasi yang tidak menambah masa manfaat aset tetap induk tidak dilakukan penyusutan. Sehingga tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi pada tahun 2016.

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp1.274.812.500*

## C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.274.812.500 sedangkan 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. Piutang Jangka Panjang tersebut timbul sebagai koreksi atas kelebihan belanja pengadaan jasa dan Aset Tak Berwujud berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) PT. MCS.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp(6.374.063)*

## C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang sesuai dengan kualitas masing-masing piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp(6.374.063) sedangkan 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Panjang | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|---|---|---|
| **Piutang Tagihan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi** | | | |
| Lancar | Rp 1.274.812.500 | 0,50% | Rp 6.374.063 |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| **Jumlah** | **Rp 1.274.812.500** | | **Rp 6.374.063** |
| **Jumlah** | **Rp 1.274.812.500** | | **Rp 6.374.063** |
| **Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **Rp 1.274.812.500** | | **Rp 6.374.063** |

*Aset Tak Berwujud Rp7.851.599.520*

## C.12 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) sampai dengan 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.851.599.520 dan Rp9.788.472.020. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 Desember 2015** | **Rp** | **9.788.472.020** |
| Mutasi tambah: | | |
| Pembelian | Rp | 138.940.000 |
| Penambahan ATB dari Belanja Modal Peralatan & Mesin | Rp | 199.000.000 |
| Mutasi kurang: | | |
| Koreksi pencatatan | Rp | (2.274.812.500) |
| **Saldo per 31 Desember 2016** | **Rp** | **7.851.599.520** |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 | Rp | (4.327.125.677) |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2016** | **Rp** | **3.524.473.843** |

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud berupa Pembelian dan Pengembangan berasal dari:

a. Pembelian Aset Tak Berwujud berasal dari pengadaan software dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Dokumentasi dan Informasi | 1 | 44,660,000 |
| 2 | Aplikasi Penelitian (Puslitbang) | 1 | 49,280,000 |
| 3 | Portal Website Badan Standardisasi Nasional | 1 | 45,000,000 |
| | **Total** | **3** | **138,940,000** |

b. Penambahan Aset Tak Berwujud yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp199.000.000.

Mutasi kurang Aset Tidak Berwujud berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 48B/LHP/XV/05/2016 tanggal 20 Mei 2016. Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan nilai perolehan serta mutasinya tersaji pada Lampiran Catatan Ringkas Barang Milik Negara.

*Aset Lain-Lain Rp1.868.786.007*

## C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp1.868.786.007 dan Rp337.502.399. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Standardisasi Nasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 Desember 2015** | **Rp** | **337,502,399** |
| **Mutasi tambah:** | | |
| -Reklasifikasi dari aset tetap | Rp | 2,073,479,541 |
| **Mutasi kurang:** | | |
| -Penghapusan BMN | Rp | (542,195,933) |
| **Saldo per 31 Desember 2016** | **Rp** | **1,868,786,007** |
| Akumulasi Penyusutan | **Rp** | **(1,868,786,007)** |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2016** | **Rp** | **-** |

Rincian Aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan serta mutasinya tersaji pada Lampiran Catatan Ringkas Barang Milik Negara.

**Rincian Penghapusan Aset Tetap**

| No. | URAIAN | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kursi Besi/Metal | 3 Unit | Rp 2,231,518 |
| 2 | Televisi | 1 Unit | Rp 46,000,000 |
| 3 | PC Unit | 7 Unit | Rp 46,405,254 |
| 4 | Laptop | 16 Unit | Rp 198,118,161 |
| 5 | Note Book | 13 Unit | Rp 249,441,000 |
| | **Total** | | **Rp 542,195,933** |

Penghapusan sebesar Rp542.195.933 merupakan penghapusan aset peralatan dan mesin berdasarkan risalah lelang No.077/2016 dan No.078/2016 tanggal 28 Maret 2016.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(6.195.911.684)*

## C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.195.911.684 dan Rp273.583.399. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

***Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya***

| No | Aset Lainnya | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| A | Aset Tak Berwujud | | | |
| 1 | *Software* Komputer | Rp 7.717.349.520 | Rp 4.327.125.677 | Rp 3.390.223.843 |
| 2 | ATB Lainnya | Rp 134.250.000 | Rp - | Rp 134.250.000 |
| **Jumlah** | | **Rp 7.851.599.520** | **Rp 4.327.125.677** | **Rp 3.524.473.843** |
| B | Aset Lain-lain | Rp 1.868.786.007 | Rp 1.868.786.007 | Rp - |
| **Jumlah** | | **Rp 1.868.786.007** | **Rp 1.868.786.007** | **Rp -** |
| **Total** | | **Rp 9.720.385.527** | **Rp 6.195.911.684** | **Rp 3.524.473.843** |

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp240.281.129*

## C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp240.281.129 dan Rp120.895.974. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan beban gaji, beban telepon, dan pembayaran royalti yang belum dibayar hingga 31 Desember 2016. Dengan rincian sebagai berikut:

| No. | URAIAN | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beban Telepon | Rp 6,147,653 |
| 2 | Beban Gaji | Rp 15,802,870 |
| 3 | Beban Royalti | Rp 218,330,606 |
| **Total** | | **Rp 240,281,129** |

Utang Royalti timbul karena penjualan standar asing yang royaltinya belum dibayarkan kepada ASTM, JIS, BES EN, ISO, dan IEC sampai dengan 31 Desember 2016.

*Pendapatan Diterima di Muka Rp710.050.000*

## C.16 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp710.050.000 dan Rp605.425.000. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima dari pemohon dan telah disetor ke kas Negara. Namun hasil pekerjaan belum diserahkan kepada pemohon sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka terlampir dalam Lampiran Laporan Keuangan.

*Ekuitas Rp28.713.397.334*

## C.15 Ekuitas

Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp28.713.397.334 dan Rp30.604.833.532. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP Rp18.453.002.862*

### D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp18.453.002.862 dan Rp16.988.487.190. Pendapatan tersebut terdiri dari:

| URAIAN PENDAPATAN | 2016 | 2015 | %NAIK (TRN) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Jasa | Rp 18.423.502.862 | Rp 16.988.487.190 | 8,45 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | Rp 10.500.000 | - | - |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain | Rp 19.000.000 | - | - |
| **Jumlah** | **Rp 18.453.002.862** | **Rp 16.988.487.190** | **8,62** |

Pendapatan Jasa adalah pendapatan-LO yang diperoleh dari Jasa Akreditasi, Jasa Pendidikan Standardisasi, Jasa Informasi Standardisasi, Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank.

*Beban Pegawai Rp43.159.146.309*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp43.159.146.309 dan Rp35.232.089.889. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

| URAIAN BEBAN PEGAWAI | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Beban Gaji | Rp 22.438.290.136 | Rp 20.697.364.137 | 8,41 |
| Beban Pegawai - Tunjangan Khusus | Rp 20.720.856.173 | Rp 14.534.725.752 | 42,56 |
| **Jumlah** | **Rp 43.159.146.309** | **Rp 35.232.089.889** | **22,50** |

*Beban Persediaan Rp1.765.044.910*

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.765.044.910 dan Rp1.818.018.940. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| URAIAN BEBAN PERSEDIAAN | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Beban Persediaan Konsumsi | Rp 1.765.044.910 | Rp 1.818.018.940 | (2,9) |
| **Jumlah Beban Persediaan** | **Rp 1.765.044.910** | **Rp 1.818.018.940** | **(2,9)** |

*Beban Barang dan Jasa Rp46.273.656.935*

## D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp46.273.656.935 dan Rp79.627.495.522. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Beban Keperluan Perkantoran | Rp 2.757.214.495 | Rp 2.621.425.093 | 0,05 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | Rp 546.400.000 | Rp 502.800.000 | 0,09 |
| Beban Bahan | Rp 6.352.566.663 | Rp 7.852.848.922 | (0,19) |
| Beban Honor Output Kegiatan | Rp 863.122.000 | Rp 871.404.000 | (0,01) |
| Beban Barang Non Operasional | Rp 4.370.598.588 | Rp 22.393.140.155 | (0,80) |
| Beban Langganan Listrik | Rp 62.765.916 | Rp 34.081.912 | 0,84 |
| Beban Langganan Telepon | Rp 144.903.189 | Rp 211.873.099 | (0,32) |
| Beban Jasa Konsultan | Rp 2.642.298.450 | Rp 9.273.917.890 | (0,72) |
| Beban Sewa | Rp 9.261.710.551 | Rp 4.753.643.427 | 0,95 |
| Beban Jasa Profesi | Rp 15.680.735.000 | Rp 18.055.955.892 | (0,13) |
| Beban Jasa Lainnya | Rp 3.591.342.083 | Rp 13.056.405.132 | (0,72) |
| **Jumlah** | **Rp 46.273.656.935** | **Rp 79.627.495.522** | (0,42) |

*Beban Pemeliharaan Rp3.774.809.979*

## D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.774.809.979 dan Rp3.115.144.434. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| URAIAN BEBAN PEMELIHARAAN | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp 2.617.183.595 | Rp 1.158.388.744 | 125,9% |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp 1.157.626.384 | Rp 1.956.755.690 | -40,8% |
| **Jumlah** | **Rp 3.774.809.979** | **Rp 3.115.144.434** | **21,2%** |

Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai Rp. 1.355.596.700 sesuai Nota Kesepakatan Angka Asersi Final NK-55/PB.6/2017, semula dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya dikoreksi menjadi Beban Pemeliharaan.

*Beban Perjalanan Dinas Rp17.817.533.972*

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp17.817.533.972 dan Rp13.528.476.327. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| URAIAN BEBAN PERJALANAN DINAS | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Beban Perjalanan Biasa | Rp 4,615,913,267 | Rp 2,085,628,873 | 121.3% |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp 852,210,000 | Rp 739,590,000 | 15.2% |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Rp 4,955,089,277 | Rp 4,189,940,341 | 18.3% |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | Rp 4,129,520,903 | Rp 2,815,728,734 | 46.7% |
| Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri | Rp - | Rp 37,286,517 | -100.0% |
| Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri | Rp 3,264,800,525 | Rp 3,660,301,862 | -10.8% |
| **Jumlah** | **Rp 17,817,533,972** | **Rp 13,528,476,327** | **31.7%** |

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp6.437.646.061*

## D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.437.646.061 dan Rp3.576.948.078. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | Rp 4.805.374.450 | Rp 3.576.836.227 | 34,3% |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | Rp 1.342.222 | Rp 111.851 | 1100,0% |
| **Jumlah Penyusutan** | Rp 4.806.716.672 | Rp 3.576.948.078 | 34,4% |
| | | | |
| Beban Amortisasi Software | Rp 1.630.929.389 | - | - |
| **Jumlah Amortisasi** | **Rp 1.630.929.389** | - | - |
| **Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **Rp 6.437.646.061** | **Rp 3.576.948.078** | **80,0%** |

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp11.327.930*

## D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.327.930 dan Rp(55.000). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek | Rp 11.327.930 | Rp (55.000) | -20696% |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang | 0 | - | - |
| **Jumlah** | **Rp 11.327.930** | **Rp (55.000)** | **-20696%** |

*Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Rp(268.322.766)*

## D.9 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(268.322.766) dan Rp821.538.000. Surplus/Defisit tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp.6.900.000 berupa Peralatan dan Mesin yang telah dihentikan dan dilelang dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp(275.222.766). Rincian atas Surplus/Defisit sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | Rp 6.900.000 | Rp 821.538.000 | -99,2% |
| Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar | Rp 275.222.766 | - | - |
| **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional** | **Rp (268.322.766)** | **Rp 821.538.000** | **-132,7%** |

*Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp148.887.528*

## D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp148.887.528 dan Rp31.234.272. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut:

| URAIAN | 2016 | 2015 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara | Rp 22.124.400 | | |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL | Rp 111.401.108 | Rp 12.075.602 | 822,5% |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL | Rp 17.437.572 | Rp 19.158.670 | -9,0% |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | Rp 16.572.900 | - | |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | Rp 18.648.452 | - | |
| **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** | **Rp 148.887.528** | **Rp 31.234.272** | **376,7%** |

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp30.604.833.532*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp30.604.833.532 dan Rp14.597.833.031.

*Surplus (defisit) LO Rp(100.905.598.472)*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah defisit sebesar Rp(100.905.598.472) dan Rp(119.056.858.728). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0*

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar sebesar Rp0 merupakan koreksi atas pengadaan Peralatan dan Mesin tahun 2015. Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas Rp(1.405.697.008)*

### E.4 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas sebesar Rp(1.405.697.008) berasal dari koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp3.629.230.780 dan koreksi nilai aset lainnya non revaluasi sebesar Rp(5.034.927.788).

***Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi***

| Uraian Koreksi | Jumlah |
|---|---|
| Jurnal Balik Vertical Blind | (22.286.808) |
| Koreksi atas Piutang PT. MCS - 2018 | 1.474.812.500 |
| Koreksi atas Piutang PT. MCS dan PT. DCP - 2017 | 1.075.273.444 |
| Akumulasi Penyusutan ATR 2015, dihilangkan di 2016 | 1.212.068.500 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin | (132.914.664) |
| Pembayaran Vertical Blind | 22.277.808 |
| **Jumlah** | **3.629.230.780** |

***Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi***

| Uraian Koreksi | Jumlah |
|---|---|
| Penyusutan pertama untuk ATB | 2.696.196.288 |
| | 63.919.000 |
| Pengakuan Piutang Jangka Panjang Lainnya | 2.274.812.500 |
| **Jumlah** | **5.034.927.788** |

*Transaksi Antar Entitas Rp100.419.859.282*

## E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp100.419.859.282 dan Rp136.269.877.028. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

| Transaksi Antar Entitas | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Diterima dari Entitas Lain | Rp. (19.022.268.750) |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | Rp. 119.816.128.032 |
| Transfer Keluar | Rp. (374.000.000) |
| **Jumlah** | **Rp. 100.419.859.282** |

**Rincian Transfer Keluar**

| | | |
|---|---|---|
| **Mutasi Debet:** | | |
| Alat Laboratorium Uji Perangkat Lainnya - NUP 6 | Rp | 687.500.000 |
| Alat Laboratorium Uji Perangkat Lainnya - NUP 7 | Rp | 247.500.000 |
| **Total** | **Rp** | **935.000.000** |
| **Mutasi Kredit:** | | |
| Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat Lainnya - NUP 6 | Rp | 412.500.000 |
| Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat Lainnya - NUP 7 | Rp | 148.500.000 |
| **Total** | **Rp** | **561.000.000** |
| **Transfer Keluar** | **Rp** | **(374.000.000)** |

*Ekuitas Akhir Rp28.713.397.334*

## E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp28.713.397.334 dan Rp30.604.833.532.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

### F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Badan Standardisasi Nasional selama tahun 2016 ini telah melakukan 6 (enam) kali revisi Dokumen Anggaran. Perubahan ini dikarenakan ada beberapa kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan belum terakomodasi pada DIPA dan POK lama, serta adanya penambahan pagu anggaran.

**Revisi 1** disetujui pada tanggal 8 Maret 2016. Revisi dikarenakan ada blokir untuk anggaran gedung laboratorium.

**Revisi 2** disetujui pada tanggal 26 Mei 2016. Revisi dikarenakan ada *self blocking* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016.

**Revisi 3** disetujui pada tanggal 28 Juli 2016. Revisi dikarenakan ada *self blocking* sesuai dengan Surat Menteri Keuangan untuk penghematan anggaran pemerintah.

**Revisi 4** disetujui pada tanggal 9 September 2016. Revisi dikarenakan ada blokir sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016.

**Revisi 5** disetujui pada tanggal 30 September 2016. Revisi dikarenakan ada blokir sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016.

**Revisi 6** disetujui pada tanggal 5 Desember 2016. Revisi internal untuk Kertas Kerja/POK sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016.

### F.2 INFORMASI TAMBAHAN

#### A. KOMITE AKREDITASI NASIONAL

**Komite Akreditasi Nasional** yang selanjutnya disebut KAN adalah suatu Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang diberi otoritas dalam melakukan kegiatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk melakukan kegiatan tertentu. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu (PP Nomor 102 Tahun 2000).

KAN di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. Pada Pasal 8 dari Keputusan Presiden RI

Nomor 78 Tahun 2001 tersebut disebutkan bahwa “pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan KAN dibebankan kepada anggaran belanja BSN”. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan sebagai implementasi terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 ditegaskan bahwa Badan Standardisasi Nasional bertugas menetapkan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi terkait dengan penerapan standar, sedangkan tugas akreditasi terhadap penerapan standar dilaksanakan oleh KAN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Komite Akreditasi Nasional tetap berbentuk Lembaga Non Struktural dengan tugas dan tanggung jawab untuk akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Selanjutnya KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN.

***Pengakuan International***

a. Pengakuan oleh *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk bidang Akreditasi *QMS Certification Bodies* berdasarkan *ISO/IEC 17021:2011* dengan ditandatanganinya *Multilateral Recognition Arrangement - PAC MLA* pada tanggal 24 Agustus 2000, dan *Multilateral Recognition Arrangement - IAF MLA* pada tanggal 22 September 2002.

b. Pengakuan oleh *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF*) untuk bidang Akreditasi *EMS Certification Bodies* berdasarkan *ISO/IEC 17021:2011* dengan ditandatanganinya *Multilateral Recognition Arrangement - PAC PAC MLA* pada tanggal 08 Juli 2004, dan *Multilateral Recognition Arrangement - IAF MLA* pada tanggal 26 Oktober 2007.

c. Pengakuan oleh *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk bidang Akreditasi *Product Certification Bodies* berdasarkan ISO/IEC Guide 65:1996/ ISO/IEC 17065:2012 dengan ditandatanganinya *Multilateral Recognition Arrangement – PAC MLA* pada tanggal 16 Juni 2009, dan *Multilateral Recognition Arrangement – IAF MLA* pada tanggal 19 Oktober 2009.

d. Pengakuan oleh *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* untuk bidang Akreditasi *Food Safety Management System* berdasarkan ISO/IEC

17021:2011 dengan ditandatanganinya *Multilateral Recognition Arrangement – PAC MLA* pada tanggal 22 Mei 2013.

e. Pengakuan oleh *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* untuk bidang Akreditasi *Person Certification Body* berdasarkan ISO/IEC 17024:2012 dengan ditandatanganinya *Multilateral Recognition Arrangement – PAC MLA* pada tanggal 16 Juni 2016.

f. Pengakuan oleh *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* untuk bidang Akreditasi Laboratorium Penguji berdasarkan *ISO/IEC 17025* dengan ditandatanganinya *Mutual Recognition Arrangement APLAC MRA* pada tanggal 22 Mei 2001, dan *Mutual Recognition Arrangement ILAC MRA* pada tanggal 20 Juni 2001.

g. Pengakuan oleh *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* untuk bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi berdasarkan ISO/IEC 17020 dengan ditandatanganinya *Mutual Recognition Arrangement APLAC MRA* pada tanggal 13 November 2003, dan *Mutual Recognition Arrangement ILAC MRA* pada tanggal 30 December 2003.

h. Pengakuan oleh *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* untuk bidang Akreditasi Laboratorium Medik berdasarkan ISO 15189 dengan ditandatanganinya *Mutual Recognition Arrangement APLAC MRA* pada tanggal 14 Maret 2013, dan *Mutual Recognition Arrangement ILAC MRA* pada tanggal 14 Maret 2013.

i. Pengakuan oleh *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* untuk bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi berdasarkan *ISO/IEC 17020* dengan ditandatanganinya *Mutual Recognition Arrangement APLAC MRA* pada tanggal 09 Desember 2004, dan *Mutual Recognition Arrangement ILAC MRA* pada tanggal 24 Oktober 2012.

Sumber: Dokumen *Signatories to ILAC Mutual Recognition Arrangement* tanggal 29 Januari 2015 (*http://ilac.org/?ddownload=3322*)

***Skema Akreditasi Yang Dioperasikan***

**a. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM)**

Jumlah Lembaga Sertifikasi Manajemen Mutu (LSSM) yang di akreditasi KAN, sampai saat ini berjumlah 36 LSSM yang tersebar di enam propinsi yang umumnya di Jawa dan hanya tiga yang ada di luar Jawa yaitu kota Takalar (Sulawesi Selatan), Denpasar dan Palembang. Dari 36 LSSM tersebut sebelas diantaranya Lembaga Pemerintah yang bertindak independen dan dua puluh lima yang lain adalah swasta (termasuk BUMN).

Sampai saat ini jumlah sertifikat ISO 9001 yang diterbitkan oleh LSSM dengan logo KAN masih terbatas yaitu 5990 sertifikat, yang relatif sedang di banding sertifikat ISO 9001 yang di peroleh perusahaan di Indonesia. Hal ini pada umumnya dikarenakan LSSM milik swasta asing baik yang diakreditasi KAN maupun yang tidak di akreditasi lebih sering mengeluarkan sertifikat tanpa logo KAN dan menggunakan logo Badan Akreditasi Negara lain, misalnya UKAS.

**b. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML)**

Sampai saat ini Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) yang diakreditasi ada 17 LSSML dengan jumlah sertifikat yang dikeluarkan sekitar 560 sertifikat yang diperoleh industri di Indonesia dengan menggunakan Logo KAN, seperti hal pada LSSM, banyak LSSML yang diakreditasi dengan Badan Akreditasi Negara lain misal UKAS (Inggris) atau DAKKS (German). Dalam meningkatkan mutu akreditasi dan sertifikasi, perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman persyaratan akreditasi dan sertifikasi terutama kaitannya dengan *aspect impact*, yang berisi analisis yang bersifat teknis disamping manajemen. Tujuh belas LSSML tersebut terdiri dari dua milik pemerintah, empat belas milik swasta dan satu milik BUMN yang berada di Jakarta, Bogor, Jogjakarta, Bali dan Amerika.

**c. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE)**

Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang telah diakreditasi KAN sebanyak 2 LSE yang berada di Jakarta dan Bandung. Dari dua lembaga tersebut satu milik pemerintah yang independen dan satu milik swasta. Dua LSE telah mengeluarkan 5 sertifikat LSE dengan logo KAN.

**d. Akreditasi Lembaga Validasi/Verifikasi Green House gases (GHG)**

Lembaga Validasi/Verifikasi GHG yang telah diakreditasi KAN sebanyak 2 LV/V yang berada di Jakarta dan Bogor. Dari dua lembaga tersebut semuanya milik swasta. Dua LV/V telah mengeluarkan 3 sertifikat V/V.

**e. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energy (EnMS)**

LSSME yang telah diakreditasi KAN sebanyak 1 LS yang berada di Jakarta. Dari lembaga tersebut telah mengeluarkan 3 sertifikat LSSME.

**f. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem *Hazard Analysis Critical Control Point* (LSSHACCP)**

Lembaga Sertifikasi Sistem *Hazard Analysis Critical Control Point* (LSSHACCP) yang telah di akreditasi KAN sebanyak 8 LSSHACCP yang berada di Jakarta dan Jawa Barat. Dari delapan lembaga tersebut dua milik pemerintah yang independen dan enam milik swasta. Dari delapan LSSHACCP tersebut telah mengeluarkan 91 sertifikat HACCP dengan Logo KAN. Ruang lingkup akreditasi terdiri dari 16 sektor.

**g. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP)**

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP) yang telah diakreditasi KAN sebanyak 8 LSSMKP yang berada di Jakarta dan Jawa Barat. Dari delapan lembaga tersebut dua milik pemerintah yang independen dan enam milik swasta. Dari delapan lembaga tersebut telah menerbitkan 196 sertifikasi ISO 22000 dengan logo KAN.

**h. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)**

Sampai saat ini Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi KAN sebanyak 49 LSPro yang berada di tujuh belas kota (Jakarta, Bogor, Surabaya, Jogjakarta, Bandung, Semarang, Tangerang, Jember, Palembang, Medan, Pekan Baru, Padang, Banda Aceh, Lampung, Pontianak, Makasar dan Manado) yang umumnya tiga puluh dua adalah Lembaga Pemerintah, dua BUMN dan lima yang lain swasta. Sertifikat produk yang telah diterbitkan sebanyak 3.565 sertifikat, baik yang diberlakukan wajib maupun sukarela.

**i. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSO)**

Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) merupakan hasil kerjasama antara KAN dengan Otoritas Kompetensi Pangan Organik (OKPO) dan Kementerian Pertanian. LSO yang telah diakreditasi KAN sebanyak 8 LSO yang berada di Jakarta, Depok, Bogor, Mojokerto, Jogjakarta, Padang dan Jember. Kedelapan LSPO tersebut terdiri dari 1 LSPO milik BUMN dan 7 milik swasta dan telah menerbitkan 355 sertifikat.

**j. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)**

Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) yang telah diakreditasi KAN sebanyak 7 LSP yang berada di Jakarta, Bandung, Blora dan Surabaya. Ketujuh lembaga tersebut merupakan empat lembaga pemerintah, dua lembaga milik BUMN dan satu lembaga milik swasta. Ruang lingkup akreditasi sertifikasi personel meliputi Auditor 9001, Petugas Pengambil Contoh (PPC), Tenaga Teknik Khusus Migas, tenaga kerja bidang Kelistrikan, tenaga kerja bidang SDM dan tenaga kerja bidang medis. Tujuh LSP tersebut telah mengeluarkan sekitar 50.000 sertifikat.

**k. Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) merupakan hasil kerjasama antara KAN dengan Kementerian Kehutanan. LVLK yang telah diakreditasi KAN sebanyak 22 LVLK yang berada di Jakarta, Depok, Bogor, Jogjakarta, Samarinda dan Tangerang, Palangkaraya, Dua puluh dua lembaga tersebut merupakan satu milik BUMN dan dua puluh satu milik swasta dan telah menerbitkan 1810 sertifikat.

**l. Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) merupakan hasil kerjasama antara KAN dengan Kementerian Kehutanan. LPPHPL yang telah diakreditasi KAN sebanyak 13 LPPHPL yang berada di Jakarta, Samarinda, Bogor, Bekasi dan Jogjakarta. Tiga belas lembaga tersebut merupakan satu milik BUMN dan dua belas milik swasta serta telah menerbitkan 194 Sertifikat.

**m. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (LSSMKI)**

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (LSSMKI) yang telah diakreditasi KAN sebanyak 2 LSSMKI yang berada di Jakarta. Kedua lembaga tersebut milik swasta. Dari delapan lembaga tersebut telah menerbitkan 39 sertifikasi ISO 27001 dengan logo KAN.

**n. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (LSSMMAK)**

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMMAK) yang telah diakreditasi KAN sebanyak 2 LSSMMAK yang berada di Jakarta. Kedua lembaga tersebut milik swasta. Dari delapan lembaga tersebut telah menerbitkan 10 sertifikasi ISO 13485 dengan logo KAN.

**o. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP)**

Lembaga sertifikasi usaha pariwisata (LSUP) merupakan hasil kerjasaman antara KAN dengan Kementerian Pariwisata. LSUP yang telah diakreditasi oleh KAN sebanyak 52 LSUP, yang berada di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Denpasar, Balikpapan, Samarinda, Makassar.

**p. Akreditasi Laboratorium Penguji (LP)**

Akreditasi Laboratorium Penguji merupakan bidang akreditasi dengan jumlah laboratorium yang diakreditasi terbanyak diantara bidang akreditasi yang dilayani oleh KAN. Sampai dengan Juni 2015, jumlah laboratorium yang diakreditasi mencapai 871 laboratorium yang tersebar di semua propinsi di seluruh Indonesia. Kebutuhan akreditasi laboratorium penguji dari tahun ke tahun semakin besar karena semakin banyak pemangku kepentingan yang memerlukan hasil pengujian yang dapat dipercaya untuk mendukung perdagangan, ekspor-impor dan penegakan kebijakan pemerintah.

**q. Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (LK)**

Perkembangan akreditasi Laboratorium Kalibrasi (LK) cukup signifikan setelah Laboratorium Penguji. Sampai dengan Juni 2015, jumlah Laboratorium Kalibrasi yang telah diakreditasi oleh KAN sebanyak 187 laboratorium. Bidang yang masuk dalam lingkup akreditasi mencakup besaran massa, volumetrik, gaya, tekanan, torsi, kekerasan (*hardness*),

suhu, panjang, kelistrikan, instrumen analisis, fotometri dan radiasi nuklir. Akreditasi atas kemampuan kalibrasi di bidang ini sangat penting dalam mendukung ketertelusuran metrologis di laboratorium penguji maupun industri.

**r. Akreditasi Lembaga Inspeksi (LI)**

Lembaga Inspeksi (LI) yang diakreditasi masih relatif sedikit di banding laboratorium. Ruang lingkup akreditasi Lembaga Inspeksi masih terbatas pada pertanian dan produk pertanian, mesin dan peralatan industri, pemeliharaan dan konstruksi industri, bahan alam dan produk kilang, barang-barang manufaktur, pemeliharaan dan konstruksi bangunan, transportasi dengan data seperti pada tabel di bawah ini. Sampai dengan Juni 2015 sebanyak 33 Lembaga Inspeksi telah diakreditasi oleh KAN.

**s. Akreditasi Laboratorium Medik (LM)**

Akreditasi Laboratorium Medik (LM) merupakan kegiatan akreditasi yang dikembangkan oleh KAN untuk dapat memberikan jaminan kepercayaan untuk layanan laboratorium medik/klinik yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sampai dengan 31 Desember 2015 jumlah Laboratorium Medik yang telah diakreditasi oleh KAN sebanyak 40 laboratorium.

**Legalitas Penerimaan dan Pengeluaran/Belanja KAN**

Dalam rangka melayani penilaian kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian melalui jasa akreditasi, KAN melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dimana dinyatakan bahwa biaya akreditasi dibebankan kepada Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi, atau Laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 tersebut dilaksanakan melalui PP Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercantum dalam PP Nomor 54 Tahun 2001 tersebut dan perubahan tarif baik nilai maupun pengelompokan jenis satuan, maka kemudian terbitlah PP Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional untuk menggantikan PP Nomor 54 Tahun 2001.

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Akreditasi oleh KAN mencakup kegiatan:

1. Permohonan akreditasi, dimana lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, atau laboratorium yang mengajukan akreditasi dilakukan audit kelayakan terhadap dokumentasi yang mereka lampirkan.
2. Audit kecukupan dimana dilakukan penilaian kecukupan dokumentasi mutu Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Inspeksi atau Laboratorium pemohon akreditasi oleh KAN terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan yang mengacu pada standar internasional.
3. Asesmen lapangan dimana dilakukan kegiatan penilaian kompetensi penerapan standar akreditasi yang telah ditetapkan terhadap Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Inspeksi atau Laboratorium.
4. Asesmen penambahan ruang lingkup akreditasi dimana dilakukan kegiatan penilaian kompetensi lingkup kerja tertentu oleh KAN yang diminta Lembaga Sertifikasi, atau Lembaga Inspeksi atau Laboratorium yang telah diakreditasi terhadap standar yang diacu.
5. Survailen dimana dilakukan kegiatan kunjungan pengawasan untuk menilai dan memantau kompetensi penerapan standar akreditasi yang telah diakui dalam lingkup tertentu terhadap Lembaga Sertifikasi, atau Lembaga Inspeksi atau Laboratorium yang telah diakreditasi.
6. Re-asesmen dimana dilakukan kegiatan penilaian kompetensi penerapan standar akreditasi yang telah ditetapkan terhadap Lembaga Sertifikasi, atau Lembaga Inspeksi atau Laboratorium oleh KAN yang masa berlaku akreditasinya telah habis.

Rincian tarif PNBP terkait jasa akreditasi dan realisasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan akreditasi di TA. 2015 adalah sebagai berikut:

*Tabel 31*
*Tarif Jasa Akreditasi Sesuai PP Nomor 62 Tahun 2007*

| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA<br>NOMOR : 62 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2007<br>JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK<br>YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Jenis penerimaan** | **Satuan** | **Tarif** |
| **I** | **JASA AKREDITASI** | | |
| | **1. Permohonan Akreditasi** | Per Permohonan | Rp. 3.500.000,00 |
| | **2. Asesmen** | | |
| | a. Paket A | Per Paket | Rp. 12.500.000,00 |
| | b. Paket B | Per Paket | Rp. 15.500.000,00 |
| | c. Paket C | Per Paket | Rp. 18.500.000,00 |
| | d. Paket D | Per Paket | Rp. 21.500.000,00 |
| | e. Paket E | Per Paket | Rp. 24.500.000,00 |
| | f. Paket F | Per Paket | Rp. 27.500.000,00 |
| | **3. Asesmen Bersama Dengan Badan Akreditasi Asing (*Cross Frontier*)** | Per Orang/Hari | Rp. 2.500.000,00 |
| | **4. Survailen** | | |
| | a. Paket A | Per Paket | Rp. 2.500.000,00 |
| | b. Paket B | Per Paket | Rp. 4.000.000,00 |
| | c. Paket C | Per Paket | Rp. 5.500.000,00 |
| | d. Paket D | Per Paket | Rp. 7.000.000,00 |
| | **5. Uji Profisiensi :** | | |
| | a. Klasifikasi A | Per Komoditi | Rp. 500.000,00 |
| | b. Klasifikasi B | Per Komoditi | Rp. 1.000.000,00 |
| | c. Klasifikasi C | Per Komoditi | Rp. 1.500.000,00 |
| | **6. Iuran Tahunan** | Per Tahun | Rp. 1.000.000,00 |

Sedangkan anggaran dan realisasi Komite Akreditasi Nasional TA 2016 adalah sebagai berikut:

*Realisasi Anggaran Komite Akreditasi Nasional TA. 2016*

| No | Nama Lembaga / Kegiatan / Sub. Kegiatan | Anggaran 2016 | Realisasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Total | % |
| 1. | **Komite Akreditasi Nasional** /Peningkatan Jasa Pelayanan Akreditasi, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Standardisasi/ Pengembangan Akreditasi dan Kelembagaan Penilaian Kesesuaian ( 04.90.03.7154.0916 ) | 10.415.866.000 | - | 10.393.912.225 | 10.393.912.225 | 99,78% |
| **JUMLAH** | | 10.415.866.000 | - | 10.393.912.225 | 10.393.912.225 | 99,78% |

# Badan Standardisasi Nasional

## LAMPIRAN LAPORAN AUDITED

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016

Gedung I BPPT Lantai 9-14
Jl. M.H Thamrin No.8, Jakarta 10340
Telp: 021 392 7422
Fax : 021 392 7527

# NERACA

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2016 DAN 2015

(DALAM RUPIAH)

| | | |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : 084 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL |
| UNIT ORGANISASI | : 01 | BADAN STANDARISASI NASIONAL |
| KDUAPPAW | : 084010100KP | null |
| KODE SATKER | : 613104 | SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL |

Tgl. Cetak 21/04/2017 7:43 AM

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2015 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ASET** | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | |
| Piutang Bukan Pajak | 7,500,000 | 84,286,808 | (76,786,808) | (91.10) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | (37,500) | (310,000) | 272,500 | (87.90) |
| Piutang Bukan Pajak (Netto) | 7,462,500 | 83,976,808 | (76,514,308) | (91.11) |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 1,045,273,444 | 0 | 1,045,273,444 | 0.00 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | (5,226,367) | 0 | (5,226,367) | 0.00 |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) | 1,040,047,077 | 0 | 1,040,047,077 | 0.00 |
| Persediaan | 119,685,005 | 117,137,000 | 2,548,005 | 2.18 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | **1,167,194,582** | **201,113,808** | **966,080,774** | **480.37** |
| **ASET TETAP** | | | | |
| Peralatan dan Mesin | 35,587,899,485 | 34,560,818,826 | 1,027,080,659 | 2.97 |
| Aset Tetap Lainnya | 6,774,028,436 | 4,694,331,111 | 2,079,697,325 | 44.30 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 3,837,380,508 | 3,837,380,508 | 0 | 0.00 |
| Akumulasi Penyusutan | (22,495,686,828) | (21,814,880,767) | (680,806,061) | 3.12 |
| **JUMLAH ASET TETAP** | **23,703,621,601** | **21,277,649,678** | **2,425,971,923** | **11.40** |
| **PIUTANG JANGKA PANJANG** | | | | |
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 1,274,812,500 | 0 | 1,274,812,500 | 0.00 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | (6,374,063) | 0 | (6,374,063) | 0.00 |
| Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) | 1,268,438,437 | 0 | 1,268,438,437 | 0.00 |
| **JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG** | **1,268,438,437** | **0** | **1,268,438,437** | |
| **ASET LAINNYA** | | | | |
| Aset Tak Berwujud | 7,851,599,520 | 9,788,472,020 | (1,936,872,500) | (19.79) |
| Aset Lain-lain | 1,868,786,007 | 337,502,399 | 1,531,283,608 | 453.71 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (6,195,911,684) | (273,583,399) | (5,922,328,285) | 2,164.73 |
| **JUMLAH ASET LAINNYA** | **3,524,473,843** | **9,852,391,020** | **(6,327,917,177)** | **(64.23)** |
| **JUMLAH ASET** | **29,663,728,463** | **31,331,154,506** | **(1,667,426,043)** | **(5.32)** |
| **KEWAJIBAN** | | | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 240,281,129 | 120,895,974 | 119,385,155 | 98.75 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 710,050,000 | 605,425,000 | 104,625,000 | 17.28 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **950,331,129** | **726,320,974** | **224,010,155** | **30.84** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **950,331,129** | **726,320,974** | **224,010,155** | **30.84** |
| **EKUITAS** | | | | |
| **EKUITAS** | | | | |
| Ekuitas | 28,713,397,334 | 30,604,833,532 | (1,891,436,198) | (6.18) |

# NERACA

**TINGKAT SATUAN KERJA**

PER DESEMBER 2016 DAN 2015

(DALAM RUPIAH)

| | | |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : 084 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL |
| UNIT ORGANISASI | : 01 | BADAN STANDARISASI NASIONAL |
| KDUAPPAW | : 084010100KP | null |
| KODE SATKER | : 613104 | SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL |

Tgl. Cetak 21/04/2017 7:43 AM

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2015 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **28,713,397,334** | **30,604,833,532** | **(1,891,436,198)** | **(6.18)** |
| **JUMLAH EKUITAS** | **28,713,397,334** | **30,604,833,532** | **(1,891,436,198)** | **(6.18)** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **29,663,728,463** | **31,331,154,506** | **(1,667,426,043)** | **(5.32)** |

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
## (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL 084
ESELON I : BADAN STANDARISASI NASIONAL 01
WILAYAH/PROVINSI : INSTANSI PUSAT 0199
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 613104

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 21/04/17 7:46 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker

| NO | URAIAN | 2016 | | | | 2015 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | 0 | | | | 0 |
| | PENERIMAAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 14,115,807,650 | 19,022,268,750 | (4,906,461,100) | 135 | 13,767,452,700 | 18,299,821,817 | (4,532,369,117) | 133 |
| | PENERIMAAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH | 14,115,807,650 | 19,022,268,750 | (4,906,461,100) | 135 | 13,767,452,700 | 18,299,821,817 | (4,532,369,117) | 135 |
| B | BELANJA | | | | 0 | | | | 0 |
| | BELANJA PEGAWAI | 44,403,218,000 | 43,143,343,439 | 1,259,874,561 | 97 | 36,761,062,000 | 35,240,803,005 | 1,520,258,995 | 96 |
| | BELANJA BARANG | 72,889,280,000 | 68,176,490,368 | 4,712,789,632 | 94 | 104,226,074,000 | 99,442,245,841 | 4,783,828,159 | 95 |
| | BELANJA MODAL | 8,885,641,000 | 8,496,294,225 | 389,346,775 | 96 | 23,824,834,000 | 22,767,659,999 | 1,057,174,001 | 96 |
| | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH BELANJA (B I + B II) | 126,178,139,000 | 119,816,128,032 | 6,362,010,968 | 95 | 164,811,970,000 | 157,450,708,845 | 7,361,261,155 | 96 |
| C | PEMBIAYAAN | | | | 0 | | | | 0 |

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : 084 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | | |
| ESELON I | : 01 | BADAN STANDARISASI NASIONAL | | |
| WILAYAH/PROVINSI | : 0100 | DKI JAKARTA | Kode Lap | : LO.SAT |
| SATUAN KERJA | : 613104 | SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Tanggal | : 21/04/17 7:44 AM |
| JENIS SATUAN KERJA | : KP | | Halaman | : 1 |
| | | | Prg ID | : lap_lo_satker |

| URAIAN | 2016 | 2015 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|---|---|---|---|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 18,453,002,862 | 16,988,487,190 | 1,464,515,672 | 8.621 |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 18,453,002,862 | 16,988,487,190 | 1,464,515,672 | 8.621 |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan | 18,453,002,862 | 16,988,487,190 | 1,464,515,672 | 8.621 |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pegawai | 43,159,146,309 | 35,232,089,889 | 7,927,056,420 | 22.5 |
| Beban Persediaan | 1,765,044,910 | 1,818,018,940 | (52,974,030) | (2.914) |
| Beban Barang dan Jasa | 46,273,656,935 | 79,627,495,522 | (33,353,838,587) | (41.887) |
| Beban Pemeliharaan | 3,774,809,979 | 3,115,144,434 | 659,665,545 | 21.176 |
| Beban Perjalanan Dinas | 17,817,533,972 | 13,528,476,327 | 4,289,057,645 | 31.704 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bunga | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | |

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

| | | |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : 084 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL |
| ESELON I | : 01 | BADAN STANDARISASI NASIONAL |
| WILAYAH/PROVINSI | : 0100 | DKI JAKARTA |
| SATUAN KERJA | : 613104 | SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL |
| JENIS SATUAN KERJA | : KP | |

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 21/04/17 7:44 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker

| URAIAN | 2016 | 2015 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 6,437,646,061 | 3,576,948,078 | 2,860,697,983 | 79.976 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 11,327,930 | (55,000) | 11,382,930 | (20,696. |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BEBAN | 119,239,166,096 | 136,898,118,190 | (17,658,952,094) | (12.899) |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (100,786,163,234) | (119,909,631,000) | 19,123,467,766 | (15.948) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | (268,322,766) | 821,538,000 | (1,089,860,766) | (132.66 |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 6,900,000 | 821,538,000 | (814,638,000) | (99.16) |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 275,222,766 | 0 | 275,222,766 | |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 148,887,528 | 31,234,272 | 117,653,256 | 376.68 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 167,535,980 | 31,234,272 | 136,301,708 | 436.385 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 18,648,452 | 0 | 18,648,452 | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON | (119,435,238) | 852,772,272 | (972,207,510) | (114.00 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (100,905,598,472) | (119,056,858,728) | 18,151,260,256 | (15.246) |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (100,905,598,472) | (119,056,858,728) | 18,151,260,256 | (15.246) |

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

| | | |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : 084 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL |
| ESELON I | : 01 | BADAN STANDARISASI NASIONAL |
| WILAYAH/PROVINSI | : 0100 | DKI JAKARTA |
| SATUAN KERJA | : 613104 | SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL |
| JENIS SATUAN KERJA | : KP | |

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 21/04/17 7:44 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker

| URAIAN | 2016 | 2015 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|---|---|---|---|
| EKUITAS AWAL | 30,604,833,532 | 14,597,833,031 | 16,007,000,501 | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (100,905,598,472) | (119,056,858,728) | 18,151,260,256 | - |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | (1,405,697,008) | (1,206,017,799) | (199,679,209) | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | 0 | 6,050,701 | (6,050,701) | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0 | 0 | 0 | - |
| SELISIH REVALUASI ASET | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI | (1,405,697,008) | (1,212,068,500) | (193,628,508) | - |
| LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 100,419,859,282 | 136,269,877,028 | (35,850,017,746) | - |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | (1,891,436,198) | 16,007,000,501 | (17,898,436,699) | - |
| EKUITAS AKHIR | 28,713,397,334 | 30,604,833,532 | (1,891,436,198) | - |

# Badan Standardisasi Nasional

## LAMPIRAN CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016

Gedung I BPPT Lantai 9-14
Jl. M.H Thamrin No.8, Jakarta 10340
Telp: 021 392 7422
Fax : 021 392 7527

**CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA**
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)**
**TAHUN ANGGARAN 2016 (AUDITED)**

## I. DASAR HUKUM

- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97/PMK.06/2007 Tentang Penggolongan dan kodefikasi BMN.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

- Perdirjen No. 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Penatausahaan Persediaan
- Perdirjen No. 62/PB/2009 tentang tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan

## II. LAPORAN BARANG

### 1. Barang Konsumsi (117111)

Saldo Barang Konsumsi Badan Standardisasi Nasional per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp120.857.200,-. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 1.172.195,- sehingga saldo akhir persediaan menjadi sebesar Rp119.685.005,-.

**Tabel 1 – Rincian Barang Konsumsi**

| NO. | URAIAN | Kuantitas | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spidol WB | 22 | Buah | 231.000 |
| 2 | Staples No.10 | 10 | Buah | 220.000 |
| 3 | Isi Staples No.10 | 13 | Pak | 780.000 |
| 4 | Paper klip no.3 | 5 | Buah | 100.000 |
| 5 | Perforator No.85 | 4 | Buah | 256.000 |
| 6 | Isi Staples No.3 | 8 | Buah | 352.000 |
| 7 | Binder Klip No.155 | 10 | Dus | 100.000 |
| 8 | Binder Klip No.105 | 79 | Dus | 316.000 |
| 9 | Binder Klip No.107 | 11 | Dus | 44.000 |
| 10 | Boxfile | 108 | Buah | 1.674.000 |
| 11 | Map Plastik | 24 | Pak | 576.000 |
| 12 | Odner Bantex | 80 | Buah | 2.400.000 |
| 13 | Map Biasa | 120 | Buah | 300.000 |
| 14 | Bussiness File | 72 | Buah | 504.000 |
| 15 | Isi Cutter Kecil | 3 | Pak | 105.000 |
| 16 | Pita Mesin Ketik Listrik | 18 | Buah | 450.000 |
| 17 | Post it 657 | 1 | Buah | 11.500 |
| 18 | Lakban Bening | 9 | Rol | 108.000 |
| 19 | Buku UU SPK | 30 | Buah | 750.000 |
| 20 | Gunting Sedang | 2 | Buah | 16.000 |
| 21 | Kertas A4 | 80 | Rim | 3.280.000 |
| 22 | Kertas Kop BSN A4 | 37 | Rim | 3.866.500 |
| 23 | Kertas Folio | 31 | Rim | 1.379.500 |
| 24 | Kertas Facsimile | 17 | Buah | 425.000 |
| 25 | Kertas Kop BSN Folio | 47 | Rim | 4.935.000 |
| 26 | Kertas Continuous Form | 4 | Rim | 1.800.000 |
| 27 | Kertas Gaji | 1 | Rim | 350.000 |
| 28 | Amplop Coklat Polos A4 | 17 | Buah | 739.500 |
| 29 | Amplop Coklat Cetak BSN | 8 | Pak | 520.000 |
| 30 | Amplop Kabinet Putih | 7 | Buah | 133.000 |
| 31 | Amplop Kabinet Cetak | 54 | Buah | 4.752.000 |

| NO. | URAIAN | Kuantitas | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Catridge Ribbon Epson LQ 2180 | 2 | Buah | 264.000 |
| 33 | Tinta HP 98 | 4 | Buah | 968.000 |
| 34 | Tinta HP 93 | 5 | Buah | 1.395.000 |
| 35 | Toner Laserjet 1020 (12A) | 1 | Buah | 1.224.000 |
| 36 | Toner Laserjet 1200 (15A) | 5 | Buah | 7.700.000 |
| 37 | Toner Laserjet 11A | 1 | Buah | 2.070.000 |
| 38 | Toner Laserjet 1300 (13A) | 5 | Buah | 6.875.000 |
| 39 | Toner Laserjet 1505n (36A) | 3 | Buah | 3.191.805 |
| 40 | Tinta HP Laser Jet N45 | 4 | Buah | 1.330.000 |
| 41 | Tinta HP Laser Jet N78 | 5 | Buah | 2.470.000 |
| 42 | Tinta Epson 73N Black | 3 | Buah | 534.000 |
| 43 | Tinta Phaser 3115 | 4 | Buah | 5.300.000 |
| 44 | Tinta Epson 73N Cyan | 3 | Buah | 534.000 |
| 45 | Tinta Epson 73N Yellow | 3 | Buah | 534.000 |
| 46 | Tinta Epson 73N Magenta | 3 | Buah | 534.000 |
| 47 | Toner HP Laser Jet CP 1025 Black | 6 | Buah | 4.830.000 |
| 48 | Toner HP Laser Jet CP 1025 Cyan | 4 | Buah | 3.588.000 |
| 49 | Toner HP Laser Jet CP 1025 Magenta | 4 | Buah | 3.588.000 |
| 50 | Toner HP Laser Jet CP 1025 Yellow | 4 | Buah | 3.588.000 |
| 51 | Toner HP Laser Jet 78A (HP 1566) | 6 | Buah | 6.300.000 |
| 52 | Toner HP 80A | 7 | Buah | 10.045.000 |
| 53 | Toner Black 125A | 2 | Buah | 1.788.000 |
| 54 | Toner Cyan 125A | 2 | Buah | 1.640.000 |
| 55 | Toner Magenta 125A | 2 | Buah | 1.640.000 |
| 56 | Toner Yellow 125A | 2 | Buah | 1.640.000 |
| 57 | Imaging Drum HP Laser Jet 126A | 4 | Buah | 4.476.000 |
| 58 | Toner Fuji Xerox Docuprint CM 225 Black (CT202264) | 1 | Buah | 1.090.000 |
| 59 | Toner Fuji Xerox Docuprint CM 225 Cyan (CT202265) | 1 | Buah | 1.090.000 |
| 60 | Toner Fuji Xerox Docuprint CM 225 Magenta (CT202266) | 1 | Buah | 1.090.000 |
| 61 | Toner Fuji Xerox Docuprint CM 225 Yellow (CT202267) | 1 | Buah | 1.090.000 |
| 62 | Flashdisk 16GB | 6 | Buah | 1.041.000 |
| 63 | Flashdisk 8GB | 3 | Buah | 225.000 |
| 64 | DVD RW Drive | 5 | Buah | 1.650.000 |
| 65 | CD/RW | 40 | Buah | 800.000 |
| 66 | Power Supply | 1 | Buah | 123.000 |
| 67 | Keyboard Logitech USB | 4 | Buah | 396.000 |
| 68 | Fan LGA Intel | 1 | Buah | 99.000 |
| 69 | Fan 478 | 10 | Buah | 550.000 |
| 70 | Heatsink Fan | 10 | Buah | 825.000 |
| 71 | Kabel VGA | 4 | Buah | 84.000 |
| 72 | Klem Kabel | 2 | pak | 11.200 |
| | Jumlah | | | 119.685.005 |

## 2. Peralatan dan Mesin (132111)

Saldo awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp34.560.818.826,- terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.723.060.200,- dan mutasi kurang sebesar Rp3.695.979.541,- sehingga saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp35.587.899.485,-.

**Tabel 2 – Mutasi Peralatan dan Mesin**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Peralatan dan Mesin | 34.560.818.826 | 4.723.060.200 | 3.695.979.541 | 35.587.899.485 |

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.723.060.200,- berasal pembelian Belanja Modal (532111) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3- Rincian Mutasi Tambah Peralatan & Mesin TA.2016**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sedan | 1 | 643,920,000 |
| 2 | Minibus | 11 | 3,154,100,000 |
| 3 | Lemari Kayu | 5 | 48,895,000 |
| 4 | Rak Kayu | 1 | 1,650,000 |
| 5 | LCD Projector Infocus | 2 | 13,585,000 |
| 6 | Meja Kerja Besi/Metal | 1 | 2,400,000 |
| 7 | Meja Kerja Kayu | 1 | 4,350,000 |
| 8 | Kursi Besi/Metal | 106 | 90,350,000 |
| 9 | Sice | 1 | 5,250,000 |
| 10 | Meja Rapat | 5 | 162,959,500 |
| 11 | AC Sentral | 1 | 33,308,000 |
| 12 | AC Split | 31 | 232,812,500 |
| 13 | Exhaust Fan | 10 | 43,978,000 |
| 14 | Loudspeaker | 2 | 7,700,000 |
| 15 | Audio Amplifier | 1 | 6,600,000 |
| 16 | Mic Wireless | 11 | 56,133,000 |
| 17 | Microphone Connector Box | 1 | 27,467,000 |
| 18 | Power Supply Microphone | 1 | 9,152,000 |
| 19 | Headset | 2 | 1,661,000 |
| 20 | Camera Digital | 2 | 27,123,000 |
| 21 | Handy Talky (HT) | 4 | 4,730,000 |
| 22 | Kursi Dorong | 1 | 2,628,100 |
| 23 | Tripod | 1 | 1,012,000 |
| 24 | P.C Unit | 1 | 13,400,840 |
| 25 | Laptop | 5 | 58,010,760 |
| 26 | Notebook | 1 | 5,445,000 |

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 27 | Storage Modul Disk | 2 | 1,210,000 |
| 28 | Printer | 2 | 10,367,500 |
| 29 | External Harddisk | 5 | 13,606,000 |
| 30 | Router | 3 | 31,790,000 |
| 31 | Hub | 2 | 4,826,000 |
| 32 | Voice Recorder | 1 | 2,640,000 |
| | **Total** | **224** | **4,723,060,200** |

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.695.979.541,- terjadi karena disebabkan oleh penghentian penggunaan 282 unit peralatan dan mesin sebesar Rp2.073.479.541,- berdasarkan Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Milik Negara No. 09A/Biro-PKT/09/2016, No.166C/Biro-PKT/09/2016 dan No. 196A/Biro-PKT/09/2016, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4 – Rincian Barang yang dihentikan Penggunaannya**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus | 1 | 257,500,000 |
| 2 | Minibus | 6 | 620,084,000 |
| 3 | Meja Kerja Kayu | 147 | 97,958,636 |
| 4 | P.C Unit | 101 | 692,122,744 |
| 5 | Laptop | 16 | 198,118,161 |
| 6 | Notebook | 11 | 207,696,000 |
| | **Total** | **282** | **2.073.479.541** |

serta pengalihan status 3 unit alat lab sebesar Rp1.622.500.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 2023/BSN/B0-b1/8/16 dan No. 2210/BSN/B0-b1/9/16 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5 – Rincian Pengalihan Status**

| No. | Nama Alat Laboratorium | Merk | Type | Nilai | Instansi Tujuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomic Absortion Spectroscopy (AAS) | Shimadzu | AA 7000 | 687.500.000 | BPMB Jakarta |
| 2 | UV-Vis Spectrophotometer | Agilent | 8453 | 247.500.000 | BPMB Jakarta |
| 3 | Atomic Absortion Spectroscopy (AAS) | Shimadzu | AA 7000 | 687.500.000 | Baristand Medan |

### 3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (132111)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat beserta perubahannya, bahwa semua aset tetap yang pengadaannya dilakukan sebelum 30 Juni 2012 harus dilakukan penyusutan agar nilai aset tetap tersaji secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi, mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan masa manfaat dan memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja untuk keperluan aset tetap tersebut.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Badan Standardisasi Nasional pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp22.495.686.828,- sehingga nilai buku dari Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp13.092.212.657,-.

### 4. Aset Tetap Dalam Renovasi (135111)

Saldo awal Aset Tetap Dalam Renovasi per 1 Januari 2016 sebesar Rp3.073.053.892,-. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.079.697.325,- sehingga, Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.152.751.217,-.

**Tabel – Mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Aset Tetap Dalam Renovasi | 3,073,053,892 | 2.079.697.325 | - | 5.152.751.217 |

Mutasi tambah Aset Tetap Renovasi sebesar Rp 2.079.697.325,- berasal dari pengadaan pekerjaan kontruksi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel – Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovasi Toilet | 1 | 1,049,317,600 |
| 2 | Renovasi Ruang Rapat Utama | 1 | 1,030,379,725 |
| | **Total** | **2** | **2.079.697.325** |

### 5. Aset Tetap Lainnya (135121)

Saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp1.621.277.219,- tidak terdapat mutasi tambah/kurang sehingga saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.621.277.219,-.

**Tabel – Mutasi Aset Tetap Lainnya**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Aset Tetap Lainnya | 1,621,277,219 | - | - | 1,621,277,219 |

### 6. Software/Aset Tidak Berwujud (162151)

Saldo awal Software per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp9.654.222.020,- terdapat mutasi tambah sebesar Rp337.940.000,- dan mutasi kurang sebesar Rp2.274.812.500,- sehingga saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah Sebesar Rp7.717.349.520,-.

**Tabel - Mutasi Aset Tidak Berwujud**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Software/ Aset Tidak Berwujud | 9,654,222,020 | 337,940,000 | 2,274,812,500 | 7,717,349,520 |

Mutasi tambah Aset tak berwujud sebesar Rp337.940.000,- berasal dari pengadaan software dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel – Rincian Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Langsung Antivirus Sophos | 299 | 198,835,000 |
| 2 | Pengembangan Langsung Antivirus Sophos | 1 | 165,000 |
| 3 | Sistem Dokumentasi dan Informasi | 1 | 44,660,000 |
| 4 | Aplikasi Penelitian (Puslitbang) | 1 | 49,280,000 |
| 5 | Portal Website Badan Standardisasi Nasional | 1 | 45,000,000 |
| | **Total** | **3** | **337,940,000** |

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.274.812.500,- berasal dari koreksi nilai pencatatan software berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK No.LHP/XV/05/2016 tanggal 31 Mei 2016.

7. **Aset Tidak Berwujud Lainnya (162191)**

Saldo awal aset tak berwujud lainnya per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp134.250.000,- tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang, sehingga saldo akhir Aset Tak berwujud lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp134.250.000,-

**Tabel Mutasi Aset tak Berwujud Lainnya**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 134,250,000 | - | - | 134,250,000 |

8. **Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112)**

a. *Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasional*

Saldo awal Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp273.583.399,-. terdapat mutasi tambah dari penghentian penggunaan BMN sebesar Rp2.073.479.541,- dan mutasi kurang sebesar Rp542.195.933 sehinga saldo akhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.1.804.867.007,-.

**Tabel – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Aset Tetap yg Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan | 273,583,399 | 2,073,479,541 | 542,195,933 | 1,804,867,007 |

Mutasi tambah Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional sebesar Rp 2,073,479,54,- berasal dari penghentian 282 unit peralatan dan mesin yang dikarenakan kondisinya telah rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel - Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) | 1 | 257,500,000 |
| 2 | Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 6 | 620,084,000 |
| 3 | Meja Kerja Kayu | 147 | 97,958,636 |
| 4 | P.C Unit | 101 | 692,122,744 |
| 5 | Laptop | 16 | 198,118,161 |
| 6 | Notebook | 11 | 207,696,000 |
| | **Total** | **282** | **2,073,479,541** |

Mutasi kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional pemerintahan sebesar Rp542.195.933,- disebabkan oleh adanya penghapusan barang berdasarkan risalah lelang No.077/2016 Tanggal 2 Maret 2016 dan 078/2016 Tanggal 28 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel - Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional Karena Penghapusan**

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kursi Besi/Metal | 3 | 2,231,518 |
| 2 | Televisi | 1 | 46,000,000 |
| 3 | P.C Unit | 7 | 46,405,254 |
| 4 | Laptop | 16 | 198,118,161 |
| 5 | Notebook | 13 | 249,441,000 |
| | **Total** | **40** | **542,195,933** |

*b. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional*

Saldo awal Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp63.919.000,-. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang sehingga saldo akhir 31 Desember 2016 adalah tetap sebesar Rp63.919.000,-

**Tabel - Aset Tak Berwujud Yg Tidak Digunakan dalam operasi Pemerintahan**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan | 63.919.000 | - | - | 63.919.000 |

**9. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp3.837.380.508,-. Terdapat Mutasi Tambah Sebesar Rp2.079.697.325,- dan mutasi kurang sebesar Rp2.079.697.325,- sehingga saldo akhir per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.837.380.508,-.

**Tabel – Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

| Uraian | Saldo Awal 1 Januari 2016 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Tambah | Kurang | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 3.837.380.508 | 2.079.697.325 | 2.079.697.325 | 3.837.380.508 |

Mutasi tambah Rp3.435.294.025,- diperoleh dari KDP beserta pengembangannya yang kemudian menjadi mutasi kurang karena sudah dilakukan penyelesaian pembangunan yang menjadi 2 aset definitif yang berupa aset tetap dalam renovasi senilai Rp3.435.294.025,- dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Kuantitas | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovasi Toilet | 1 | 1.049.317.600 |
| 2 | Renovasi Ruang Rapat | 1 | 1.030.379.725 |
| | **Grand Total** | **2** | **2.079.697.325** |

10. **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan (166112)**

Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.804.867.007,- dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.804.867.007,- Sehingga nilai Netto/Buku Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,-

11. **Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan (166113)**

Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp63.919.000,- dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp63.919.000,- Sehingga nilai Netto/Buku Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,-

## III. Informasi Tambahan

Di dalam peralatan dan mesin terdapat 26 alat laboratorium uji perangkat lainnya sebesar Rp6.939.625.000 yang diperuntukkan dalam rangka mendukung peningkatan penerapan Standar Nasional Indonesia yang di tempatkan di 9 laboratorium instansi pemerintah yang terlibat dalam penerapan SNI di 6 kota yaitu : Medan, Yogyakarta, Bandung, Pontianak, Semarang dan Jakarta. Hal ini telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahun 2010.

Berdasarkan SK Pengalihan status No.141.A/KEP/BSN/9/2014 tanggal 16 September 2014, BSN akan mengalihkan status sebanyak 5 unit alat Laboratorium uji perangkat lainya senilai **Rp.78.925.000,-** ke Kementerian Perdagangan.

Berikut rincian status kepemilikan alat laboratorium yang telah di alihkan status kepemilikannya dan yang masih dalam proses pengalihan status:

## Tabel 16 - Perkembangan Proses Pengalihan Alat Laboratorium

| No | Instansi Penerima | Nama Alat | Merk | Tipe | Q | Nilai | Total Nilai | Total Nilai | Kementerian Induknya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPMBEI Jakarta | AAS | Shimadzu | AA-700 | 1 | 687.500.000 | 687.500.000 | | Kementerian Perdagangan |
| | | UV-Vis Spectrophotometer | Agilent | 8453 | 1 | 247.500.000 | 247.500.000 | | |
| | | Sharp Edge Tester | Tony International | TW-220 | 1 | 22.000.000 | 22.000.000 | | |
| | | Steel Needle | Tony International | TW-221 | 1 | 1.045.000 | 1.045.000 | | |
| | | Electric Resistance Tester | Electra Meg | RT500 | 1 | 22.000.000 | 22.000.000 | | |
| | | Template E | Gester International | - | 1 | 880.000 | 880.000 | | |
| 2 | BBKKP Yogyakarta | Uji Permeabilitas ASTM E96 | WVTR | Perme W3/030 | 1 | 220.000.000 | 220.000.000 | | Kementerian Perindustrian |
| | | | Total | | | | | 1.200.925.000 | |
| 3 | Baristand Medan | AAS | Shimadzu | AA-700 | 1 | 687.500.000 | 687.500.000 | | Kementerian Perindustrian |
| 4 | BPSMB Medan | AAS | Shimadzu | AA-700 | 1 | 687.500.000 | 687.500.000 | | Pemda Sumatera Utara |
| | | | Total | | | | | 1.375.000.000 | |
| 5 | STTT Bandung | Uji Kekuatan Tarik | Mesdan-Lab | Tensolab 5000 | 1 | 440.000.000 | 440.000.000 | | Kementerian Perindustrian |
| | | Wrinkle Recovery Tester | Mesdan-Lab | Code-3110 | 1 | 49.500.000 | 49.500.000 | | |
| | | Thermo Hygrograph | Mesdan-Lab | Code-180B | 3 | 3.300.000 | 9.900.000 | | |
| | | Wascator | Mesdan-Lab | Code-310B | 1 | 264.000.000 | 264.000.000 | | |
| | | Spin Dryer | Mesdan-Lab | Code-336B | 1 | 22.000.000 | 22.000.000 | | |
| | | Tumble Dryer Machine | Mesdan-Lab | Code-3111 | 1 | 52.800.000 | 52.800.000 | | |
| | | Launder-O-meter | Mesdan-Lab | Code-311B | 1 | 137.500.000 | 137.500.000 | | |
| 6 | B4T Bandung | Portable Kamera EMC | TDK | VC-04 dan SI-300 ( | 1 | 220.000.000 | 220.000.000 | | Kementerian Perindustrian |
| | | | Total | | | | | 1.195.700.000 | |
| 7 | BBTPPI Semarang | AAS | Shimadzu | AA-700 | 1 | 687.500.000 | 687.500.000 | | Kementerian Perindustrian |
| | | | Total | | | | | 687.500.000 | |
| 8 | BBKB Yogyakarta | UV-Vis Spectrophotometer | Agilent | 8453 | 1 | 247.500.000 | 247.500.000 | | Kementerian Perindustrian |
| | | Uji Derajat Putih | X-Rite | Elcometer 6075/1 S | 1 | 110.000.000 | 110.000.000 | | |
| | | FTIR | Shimadzu | IR Prestige-21 | 1 | 605.000.000 | 605.000.000 | | |
| | | Mikroskop IR | Shimadzu | AIM-8800 | 1 | 797.500.000 | 797.500.000 | | |
| | | Projective Velocity | Tony International | - | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 | | |
| | | | Total | | | | | 1.793.000.000 | |
| 9 | Baristand Pontianak | AAS | Shimadzu | AA-700 | 1 | 687.500.000 | 687.500.000 | | Kementerian Perindustrian |
| | | | Total | | | | | 687.500.000 | |
| | | Total | | | 26 | | | 6.939.625.000 | |